

**PELAYANAN PROFESIONAL
KURIKULUM 2004**

**KURIKULUM
BERBASIS KOMPETENSI**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jakarta, 2003**

Katalog dalam Terbitan

Indonesia. Pusat Kurikulum, Badan Penelitian
dan Pengembangan

Departemen Pendidikan Nasional

Pelayanan Profesional Kurikulum 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi, - Jakarta:

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas: 2003

iv, 20 hal.

KATA PENGANTAR

Perubahan dan perkembangan aspek kehidupan perlu direspon oleh kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu pendidikan yang demikian itu sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka, dan berdemokrasi, serta mampu bersaing secara terbuka di era global sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Dalam pada itu, kinerja pendidikan menuntut adanya pembenahan dan penyempurnaan terhadap aspek substantif yang mendukungnya, yakni kurikulum.

Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas telah menyiapkan seperangkat kurikulum yang disebut dengan “Kurikulum 2004”. Sebelum kurikulum ini diberlakukan secara nasional telah dilakukan rintisan pelaksanaan (pilot mini) di beberapa sekolah kemudian dilanjutkan dengan perluasan rintisan pelaksanaan di sejumlah sekolah yang lebih banyak. Rintisan dan perluasan rintisan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang kekuatan dan kelemahan perangkat yang telah disusun sebagai bahan penyempurnaan.

Perangkat kurikulum 2004 terdiri atas Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran. Perangkat Kurikulum 2004 juga didukung oleh perangkat layanan profesional yang terdiri atas (1) Pemahaman terhadap Kurikulum 2004, (2) Model Sistem Penyampaian Kurikulum, (3) Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif, (4) Pengelolaan Kurikulum di Tingkat Sekolah, (5) Model Pelatihan dan Pengembangan Silabus.

Jakarta, November 2003
Kepala Pusat Kurikulum

Dr. H. Siskandar, MA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	5
BAB II. PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI..	7
A. Perubahan.....	8
B. Implikasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi	9
C. Model Sistem Penyampaian Kurikulum 2004	8
BAB III. IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI.....	10
A. Koordinasi dan Legitimasi.....	11
B. Prinsip Implementasi.....	12
C. Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi	14
BAB IV. EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI.....	18
A. Tujuan Evaluasi.....	18
B. Tahapan Evaluasi.....	18
BAB V. PENUTUP.....	20

1

PENDAHULUAN

Dalam percaturan global, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” Indonesia sebagai bagian kehidupan bangsa di dunia harus senantiasa berupaya mengimbangi kemajuan tersebut. Bila tidak demikian bangsa Indonesia akan tertinggal dan bahkan terkucil dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Salah satu contoh adalah hasil penelitian di Asia tentang penyelenggaraan pendidikan di setiap negara. Ternyata hasil cukup mengharukan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke tigabelas setelah Vietnam (Mendikbud, 2002). Bangsa Indonesia harus membangun diri untuk bisa bersaing dalam banyak hal, karena itu peningkatan mutu sumber daya manusia harus menjadi prioritas pertama.

Pembangunan yang dimaksud tentunya adalah pembangunan pendidikan yang terencana dan berorientasi kepada kebutuhan generasi muda di masa depan. Tantangan kehidupan di masa depan pada hakekatnya adalah tantangan terhadap kompetensi yang dimiliki manusia. Karena itu arah pengembangan kurikulum harus berbasis pada pengembangan potensi manusia yang beragam. Perlu disadari bahwa manusia dilahirkan unik dengan segala keberagaman dan kecepatannya. Karena itu kurikulum sebagai acuan dan fasilitator penyelenggaraan pendidikan, sayogianya memberi peluang adanya kemerdekaan dan pemerataan dalam pendidikan.

Berbagai kejadian dan peristiwa di tanah air Indonesia baik berupa: eksploitasi pusat atas daerah, eksploitasi manusia atas manusia, penggunaan jabatan yang sewenang-wenang serta jauh dari sumpah jabatan, perilaku kekerasan di kalangan remaja, percaturan bisnis yang tak beretika, perilaku politik yang tidak beretika, masalah mutu tenaga kerja dan sebagainya, semuanya, itu harus menjadi inspirasi bagi pengembangan perinsip-perinsip kurikulum.

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan yang cukup berperan menentukan kualitas lulusan. Namun guru itu sendiri juga dalam dilema permasalahan baik dari sudut kualitas maupun kesejahteraan. Karena itu

implementasi kurikulum harus dapat menjembatani itu semua dalam rangka menggapai kemajuan yang berbudaya tanpa ada yang dikorbankan,

Perangkat Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan resep instan terhadap masa depan bangsa Indonesia di mata dunia, kondisi bangsa saat ini, kondisi sekolah, kondisi guru, serta keberagaman anak didik dengan segala kecepatan dan kelambanannya. Ini berarti bahwa implementasi kurikulum akan membawa angin segar serta kegairahan bekerja kepada para pelaksana pendidikan di sekolah.

2

PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Untuk itu upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlaq, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. dengan demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan peserta didik yang dimaksudkan itu telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut:

1. Perubahan keempat UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004.
3. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom, yang antara lain menyatakan pusat berkewenangan dalam menentukan: kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional; dan kalender pendidikan.
5. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 yang antara lain; perlu

dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan; dan dilakukan penyempurnaan kurikulum dan diversifikasi.

6. Gerakan peningkatan mutu pendidikan yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Menyadari bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini belum mencapai pada taraf yang memadai (*critical mass*) yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya.

Referensi mengenai mutu pendidikan perlu didudukkan secara utuh yang mencakup dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni dari segi moral, akhlaq, akal, pengetahuan, keterampilan, dan amal perbuatan/perilaku.

Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik dan lebih khusus lagi hanya aspek kognitif. Pandangan ini telah membawa dampak terabaikannya aspek-aspek moral, akhlaq, budi pekerti, seni dan olah raga serta "*life skill*".

Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan penyempurnaan kurikulum dengan pendekatan berbasis kompetensi.

A. Perubahan

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang dinamis, oleh karena itu kurikulum juga harus peka dan sekaligus mampu merespon beragam perubahan dan beragam tuntutan *stakeholders* yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Negara-negara berkembang dan negara maju di hampir seluruh dunia sekarang ini tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya dengan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Dengan adanya kecenderungan globalisasi dan keinginan untuk menyesuaikan tuntutan kebutuhan serta aspirasi bangsa Indonesia di masa depan akan membawa implikasi terhadap perubahan-perubahan kebijakan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Jika selama ini kebijakan pengembang pendidikan dilakukan secara terpusat (*sentralistik*), di mana semua kebijakan mulai dari kurikulum sampai pedoman pelaksanaan teknis ditangani oleh pusat. Maka, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dan kewenangan daerah.

B. Implikasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Adanya perubahan yang terjadi di masyarakat dan adanya tuntutan globalisasi, telah menimbulkan beberapa implikasi dalam pengambilan kebijakan terhadap pelaksanaan pendidikan, seperti :

1. Penetapan standar kompetensi peserta didik dan warga belajar.
2. Pengaturan kurikulum nasional.
3. Penilaian hasil belajar secara nasional.
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan.
5. Penetapan standar materi pelajaran pokok, penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.

UU No. 22 tahun 1999 dan pp No. 25 tahun 2000 berimplikasi terhadap kebijaksanaan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Perubahan pengelolaan tersebut merupakan upaya pemberdayaan daerah dan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh. Wujud dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam bidang kurikulum yaitu pembuatan silabus yang dibuat oleh daerah dan sekolah.

3

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

A. Koordinasi dan Legitimasi

Keberhasilan suatu inovasi pendidikan, khususnya inovasi dalam pengenalan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi sangat bergantung pada seberapa jauh dimensi koordinasi dapat dilakukan secara efektif dan komunikatif antar “*stakeholder*” yang terkait. Beberapa “*stakeholder*” yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaksanaan kurikulum itu meliputi :

- Lembaga Pendidikan Guru pra jabatan (*pre-service training institution*) seperti LPTK, IKIP, Universitas, STKIP.
- Institusi Pembina Guru dalam jabatan (*In-service Training Program*) seperti PPPG, BPG, Direktorat Dikdasmen, Dinas Pendidikan.
- Pusat Kurikulum Pusat Perbukuan
- Sekolah (guru & Kepala sekolah & Pengurus Yayasan) Orang tua
- Siswa
- Masyarakat seperti pemerhati pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, parpol, organisasi non partisipan
- Dewan Pendidikan Komite Sekolah
- Perguruan Tinggi Kelompok Asosiasi

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam koordinasi adalah “kesamaan visi” dan “kesamaan langkah” dalam memberikan bantuan pada sekolah (guru dan kepala sekolah) sehingga sekolah tidak kebingungan ketika akan memulai untuk menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dalam kondisi ini, sekolah (guru dan Kepala Sekolah) harus berada pada titik pusat “*network*” yang simpul-simpulnya menyertakan “*stakeholder*” lain yang berkepentingan dengan sekolah baik kepentingan pembinaan maupun kepentingan pemanfaatannya.

Beberapa ciri koordinasi efektif itu antara lain

- Semua keputusan “*stakeholder*” mengalir cepat ke “*stakeholder*” lain yang ada dalam jaringan (*network system*)

- Semua kegiatan “*stakeholder*” untuk membina sekolah harus ada dalam payung
- visi yang jelas dan telah disepakati bersama
- Satu masalah dalam simpul jaringan harus dirasakan dan dipecahkan oleh semua “*stakeholder*” yang terkait
- Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing “*stakeholder*”
- Semua keputusan, kegiatan “*stakeholder*” tidak melemahkan profesionalisme guru/kepala sekolah dan sekolah

Semua bentuk/gagasan pembinaan untuk sekolah perlu memenuhi empat prinsip manajemen, yaitu P (*Planning*), O (*Organizing*), A (*Actuating*), dan C (*Controlling*) Khusus yang berkaitan dengan “legalisasi” pada penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kepastian “kapan *launching* KBK dimulai” dan “bagaimana tahapan-tahapan implementasinya” serta “apa strategi/pola desiminasinya”. Semua ini telah ditetapkan dalam satu keputusan menteri. Penetapan ini akan berimplikasi pada pola penyempurnaan pendidikan sekolah di sekolah/ perguruan tinggi seperti tentang sistem ujian akhir, sistem penerimaan siswa/mahasiswa baru, mekanisme penyediaan dana, atau pada mekanisme sosialisasi, baik sosialisasi dari tingkat pusat ke daerah atau dari tingkat daerah ke sekolah.

B. Prinsip Implementasi

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) telah berjalan sejak tahun 2001 pada beberapa sekolah yang dijadikan mini pilot. Implementasi KBK merupakan salah satu bagian penting untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan KBK baik dari aspek keterbacaan, keluasan, kedalaman, dan keterlaksanaannya di lapangan.

Implementasi yang telah dilakukan tersebut meliputi beberapa prinsip yaitu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM); Penilaian Berbasis kelas; dan Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah.

1) Penilaian Berbasis Kelas

Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan “mengukur apa yang hendak diukur” dari siswa.

Salah satu prinsip penilaian berbasis kelas yaitu, penilaian dilakukan oleh guru dan siswa. Hal ini perlu dilakukan bersama karena hanya guru yang bersangkutan yang paling tahu tingkat pencapaian belajar siswa yang diajarnya. Selain itu siswa yang telah diberitahu oleh guru tersebut bentuk/cara penilaiannya akan berusaha meningkatkan prestasinya sesuai dengan kemampuannya.

Prinsip penilaian berbasis kelas lainnya yaitu: tidak terpisahkan dari KBM, menggunakan acuan patokan, menggunakan berbagai cara penilaian (tes dan non tes), mencerminkan kompetensi siswa secara komprehensif, berorientasi pada kompetensi, valid, adil, terbuka, berkesinambungan, bermakna, dan mendidik.

Penilaian tersebut dilakukan antara lain meliputi: kumpulan kerja siswa (*portofolio*), hasil karya (*product*), penugasan (*project*), unjuk kerja (*performance*) dan tes tertulis (*paper and pencil test*).

Setelah melakukan serangkaian penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, maka orang tua siswa akan menerima laporannya secara komunikatif dengan menitik beratkan pada kompetensi yang telah dicapai oleh anaknya di sekolah.

2) Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sehingga mereka akan “tahu” terhadap pengetahuan dan pada akhirnya “mampu” untuk melakukan sesuatu.

Prinsip dasar KBM adalah memberdayakan semua potensi yang

dimiliki siswa sehingga mereka akan mampu meningkatkan pemahamannya terhadap fakta/konsep/prinsip dalam kajian ilmu yang dipelajarinya yang akan terlihat dalam kemampuannya untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif.

Prinsip dasar KBM lainnya yaitu: berpusat pada siswa, mengembangkan kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan belajar melalui berbuat.

Prinsip KBM di atas akan mencapai hasil yang maksimal dengan memadukan berbagai metode dan teknik yang memungkinkan semua indera digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing pelajaran.

3) Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah

Salah satu prinsip implementasi KBK adalah Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah. Prinsip ini perlu diimplementasi untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka.

Prinsip Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah ini mengacu pada “kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan”. Yang dimaksud dengan “kesatuan dalam kebijaksanaan” ditandai dengan sekolah-sekolah menggunakan perangkat. dokumen KBK yang “sama” dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan “Keberagaman dalam pelaksanaan” ditandai dengan keberagaman silabus yang akan dikembangkan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolahnya.

Dengan adanya Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah ini maka banyak pihak/instansi yang akan berperanan dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya, misalnya: sekolah, kepala sekolah, guru, dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas pendidikan propinsi dan DEPDIKNAS.

C. Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Seperti telah di kemukakan di atas dengan prinsip keberagaman dalam pelaksanaan maka setiap sekolah dan guru dilapangan mempunyai tanggung jawab untuk menterjemahkan KBK dalam bentuk silabus yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas.

Silabus yang dibuat oleh masing-masing sekolah dan guru tersebut disusun berdasarkan karakteristik sekolahnya, baik dari aspek kemampuan sekolah, kemampuan guru, kemampuan siswa, sarana/prasarana yang dimiliki sekolah dan sebagainya. Selain itu dalam menyusun silabus tidak ada “acuan” baku mengenai format dan isinya sehingga guru diberi keleluasaan yang besar untuk mengapresiasi kemampuannya menterjemahkan KBK.

Dalam penyusunan silabus dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli atau instansi yang relevan di daerah setempat seperti tokoh masyarakat, instansi pemerintah, komite sekolah, dewan pendidikan, instansi swasta, perusahaan, perindustrian, dan sebagainya.

1) Acuan Penyusunan Pedoman Pengembangan Silabus bagi Direktorat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah berkewajiban untuk menyusun pedoman pengembangan silabus yang akan dijadikan acuan oleh guru-guru dalam menyusun silabusnya. Adapun acuan penyusunan pedoman pengembangan silabus tersebut yaitu:

- (a) Mengkaji KBK dengan seksama untuk diterjemahkan dalam bentuk silabus
- (c) Mensosialisasikan silabus yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing
- (d) Memantau penyusunan dan implementasi silabus di tingkat kabupaten/kota

2) Acuan Penyusunan Silabus Bagi Daerah/Sekolah

Silabus yang telah di tetapkan dan di sosialisasikan oleh Direktorat

diatas perlu untuk diterjemahkan lebih lanjut pada daerah/sekolah masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Adapun acuan penyusunan silabus bagi daerah/sekolah sebagai berikut:

- (a) Membuat rambu-rambu pengembangan silabus yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya
- (b) Membentuk tim pengembang silabus pada tingkat sekolahnya masing-masing
- (c) Memfasilitasi kebutuhan guru-guru dalam menyusun silabus

Pentahapan Pelaksanaan

1. Piloting

Sejak tahun anggaran 2000/2001 Pusat Kurikulum Balitbang Diknas telah melakukan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dikembangkan oleh Pusat Kurikulum bekerjasama dengan para ahli pendidikan dari perguruan tinggi dan guru. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum yang ada dengan mengakomodasikan dinamika masyarakat terhadap kurikulum khususnya dan pendidikan pada umumnya serta didasarkan pada kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Dari pengembangan kurikulum tersebut diperoleh dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Mulai tahun ajaran 2001/2002 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diimplementasikan secara terbatas dalam bentuk mini piloting di beberapa daerah/sekolah. Daerah yang dijadikan mini piloting yaitu Sidoarjo di Jawa Timur, Bandung di Jawa Barat, Serang di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di DKI Jakarta. Sekolah yang dijadikan mini piloting harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pusat Kurikulum. Kriteria sekolah tersebut antara lain:

1. Memiliki sumber daya manusia yang lengkap
2. Memiliki sarana pendidikan yang lengkap

3. Memiliki dana yang cukup
4. Memiliki nara sumber dari luar sekolah

Tujuan dari mini piloting ini untuk menguji-empiriskan kebenaran dan kelemahan Kurikulum Berbasis Kompetensi secara langsung baik dalam penyusunan silabus maupun dalam pembelajarannya. Sedangkan dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan definitif dimana sejumlah sekolah tertentu ditetapkan untuk melaksanakan kurikulum atas kesepakatan antara pusat dengan daerah. Kedua pendekatan partisipatif dimana daerah di luar mini piloting dapat mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di daerah mini piloting dimulai kelas I dan IV di Sekolah Dasar (SD) serta kelas I di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun pelajaran 2002/2003 kelas I di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara menyeluruh baik yang sudah dan akan dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat diketahui berdasarkan rancangan pentahapan yang tertera dalam label di bawah ini :

TAHUN PELAJARAN	K E L A S											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

2) Sosialisasi dan Diseminasi Nasional

Sejalan dengan dihasilkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) oleh Pusat Kurikulum Balitbang Diknas, maka mulai Tahun pelajaran 2002/2003 telah : dilakukan sosialisasi Kurikulum tersebut. Kegiatan Sosilisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dilakukan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas bekerjasama dengan Unit Utama lainnya yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Daerah.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk menjelaskan perangkat dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke daerah/sekolah di propinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. Kegiatan sosialisasi ini untuk menjelaskan mengenai perangkat dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi antara lain:

1. Mengapa dilakukan penyempurnaan kurikulum ?
2. Mengapa Kurikulum Berbasis Kompetensi ?
3. Apakah Kurikulum Berbasis Kompetensi ?
4. Bagaimana komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi ?

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara antara lain pelatihan/lokakarya, seminar, dan multimedia. Pelatihan atau lokakarya dilakukan oleh Pusat Kurikulum bekerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah dengan cara menatar atau membina guru untuk menyusun silabus. Seminar dilakukan oleh Pusat Kurikulum dengan instansi terkait untuk menjelaskan perangkat dokumen Kurikulum Berbasis kompetensi kepada *stakeholder* Selain itu, dalam kegiatan Sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Pusat Kurikulum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yaitu : dengan membuat *web site* di situs internet. Desiminasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK secara nasional akan dilaksanakan tahun pelajaran 2004/2005.

4

EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

A. Tujuan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah/sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti, dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dianalisa oleh peserta didik.

Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan pengembangan kurikulum sebagai upaya untuk mengkaji ulang pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan.

Evaluasi untuk program pelaksanaan pengembangan kurikulum di daerah memerlukan indikator keberhasilan sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan kurikulum. Indikator keberhasilan kurikulum mencakup:

1. Indikator keberhasilan sosialisasi kurikulum
2. Indikator keberhasilan penyusunan silabus
3. Indikator keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester
4. Indikator keberhasilan penyusunan rencana pembelajaran
5. Indikator keberhasilan penyusunan bahan ajar
6. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar

B. Tahapan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dilakukan oleh Tim ahli dari tingkat Pusat, Propinsi, dan daerah/kabupaten. Evaluasi ini dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan untuk memperbaiki program pengembangan kurikulum terhadap keberhasilan sosialisasi kurikulum berstandar nasional, keberhasilan penyusunan silabus,

keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester, keberhasilan penyusunan rencana pengajaran dan bahan ajar, serta keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi menggunakan indikator keberhasilan pelaksanaan pengembangan kurikulum di daerah/sekolah dan selain itu evaluasi juga dapat dilakukan melalui pentahapan, mulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir pelaksanaan kurikulum berstandar nasional.

Evaluasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan penilaian dalam penerapan kurikulum berstandar nasional yang dikembangkan atau disusun berdasarkan kemampuan daerah/sekolah, potensi daerah, dengan kekhasan/cirikhas daerah/sekolah. Prinsip penilaian pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan daerah masing-masing adalah penilaian terhadap relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitasnya.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum tidak hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajarannya, tetapi juga rancangan dan pelaksanaan kurikulum, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, serta sumber belajarnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan pada tingkat pusat, daerah dan sekolah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan hasil yang lebih optimal. Hasil tersebut dapat juga digunakan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan pelaksanaan pendidikan di daerah dalam memahami dan membantu meningkatkan kemampuan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan perangkat

5

PENUTUP

Kurikulum Berbasis Kompetensi ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kurikulum ini merupakan suatu sistem kurikulum nasional yang mengakomodasikan berbagai kebutuhan tingkat nasional, daerah, dan sekolah, serta dapat diperkaya untuk kepentingan global. Sebagai suatu sistem, Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan standar kompetensi nasional. Daerah dan sekolah menjabarkan standar tersebut ke dalam seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan, pengalaman belajar, materi pembelajaran, alokasi waktu, pengelolaan kelas, media dan sumber belajar, serta penilaian hasil belajar.

Keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi ditandai dengan perwujudan kebiasaan berpikir dan bertindak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Kurikulum perlu dinilai secara berencana dan berkala untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian kurikulum dilakukan oleh berbagai komponen yang relevan.